



PENGENDALIAN INTERN PIUTANG UNTUK MEMINIMALKAN PIUTANG TAK TERTAGIH KP-RI JAYA DINAS P DAN K KABUPATEN SIMALUNGUN

Efriliana Naibaho^{1)*}, Supitriyani²⁾, Sepbeariska Manurung³⁾, Nelly Ervina⁴⁾

¹ Program Studi Akuntansi, STIE Sultan Agung, Pematangsiantar, Sumatera Utara, Indonesia.

² Program Studi Akuntansi, STIE Sultan Agung, Pematangsiantar, Sumatera Utara, Indonesia.

³ Program Studi Akuntansi, STIE Sultan Agung, Pematangsiantar, Sumatera Utara, Indonesia.

⁴ Program Studi Akuntansi, STIE Sultan Agung, Pematangsiantar, Sumatera Utara, Indonesia.

*E-mail: ¹efrillian95@gmail.com, ²supitriyani@stiesultanagung.ac.id,

³sepbeariska@stiesultanagung.ac.id, ⁴nellyervina@stiesultanagung.ac.id

Abstrak

Dalam pengendalian intern terdapat syarat pemberian pinjaman yang harus dijalankan dengan baik. Fungsi-fungsi yang berkaitan dengan penagihan maupun pemberian kredit dipisahkan sesuai dengan bagian atau fungsinya masing-masing. Analisis pemberian pinjaman juga salah satu cara untuk dapat mengendalikan piutang tak tertagih yang ada pada koperasi. Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui pengendalian intern piutang dan piutang tak tertagih pada KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun dan untuk mengetahui faktor penyebab piutang tak tertagih meningkat pada KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah laporan rapat anggota tahunan pada KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun periode 2013 sampai 2017. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan metode wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan analisis induktif. Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern piutang untuk meminimalkan piutang tak tertagih belum berjalan efektif dimana penagihan piutang yang dilakukan oleh pihak koperasi hanya menggunakan dua kebijakan yaitu melalui telepon dan kunjungan personal, faktor intern dan faktor ekstern juga menyebabkan adanya piutang tak tertagih. Hasil penelitian ini menyarankan sebaiknya membuat surat perjanjian diawal pinjaman untuk mengambil tindakan apabila suatu saat terjadi penunggakan angsuran dan praktik yang sehat serta syarat pemberian pinjaman lebih dimaksimalkan.

Kata kunci: Pengendalian Intern, Piutang Tak Tertagih

INTERNAL CONTROL RECEIVES TO MINIMIZE BAD DEBT KP-RI JAYA DINAS P AND K KABUPATEN SIMALUNGUN

Abstract

In controlling internal loans that must be given to run properly. Functions related to billing or credit are approved according to their respective parts or functions. Loan analysis is also one way to control the uncollectible loans in the cooperative. The purpose of this research are: to find out the description of internal control of accounts receivable and uncollectible accounts of KP-RI Jaya Dinas P and K. and to find out the factors that cause bad debts to increase of KP-RI Jaya Dinas P and K. This research was conducted using descriptive analysis method. The object of this research is the report of the member annual meetings meeting at KP-RI Jaya Dinas P and K Kabupaten Simalungun for the period of 2013 to 2017. Data collection was carried out by the documentation method and interview method. The analysis technique used is descriptive analysis and inductive analysis. This is caused by internal and external factors. The results of the analysis it can be concluded that the internal control of accounts receivable to minimize uncollectible receivables has not been effective where the collection of accounts receivable carried out by the cooperative only uses two policies, namely through telephone and personal visits, internal factors and external factors also cause uncollectible accounts. The results of this research suggest that you should make a letter of agreement at the beginning of the loan to take action if one day there is a delinquency in installments and sound practices and the terms of lending are more maximized.

Keywords: Internal Control, Bad Debts

Article History: Received: 9 Sep 2019 Revised: 18 Sep 2019 Accepted: 15 Okt 2019

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian saat ini menyebabkan setiap koperasi harus bersaing secara optimal demi kemajuan maupun perkembangan koperasi. Untuk menghadapi persaingan ekonomi tersebut, koperasi harus meningkatkan evaluasi kinerja karyawan maupun pengurus agar mampu bersaing dengan koperasi lainnya. Pada umumnya setiap koperasi mengharapkan laba (SHU) yang semakin meningkat demi kelangsungan hidup koperasi itu sendiri. Namun untuk mencapai hal tersebut koperasi harus mampu mengontrol piutang yang diberikan kepada anggota khususnya piutang tak tertagih. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pengendalian intern.

Dalam pengendalian intern terdapat syarat pemberian pinjaman yang harus dijalankan dengan baik. Fungsi-fungsi yang berkaitan dengan penagihan maupun pemberian kredit dipisahkan sesuai dengan bagian atau fungsinya masing-masing. Analisis pemberian pinjaman juga salah satu cara untuk dapat mengendalikan piutang tak tertagih yang ada pada koperasi.

Piutang tak tertagih pada koperasi ini timbul karena adanya unsur kesengajaan dari nasabah untuk tidak membayar angsuran, ditambah lagi kurang optimalnya pengendalian dalam menganalisis kredit yang dilakukan. Hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Audia (2018). Hal ini berarti bahwa setiap analisis kredit yang baik akan mampu meminimalkan piutang tak tertagih. Seperti yang terlihat pada tabel daftar piutang tak tertagih KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun untuk periode 2013 – 2017 pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Daftar Piutang Tak Tertagih KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun Periode 2013 - 2017

Tahun	Piutang yang Harus Ditagih (Rp)	Realisasi (Rp)	Piutang Tak Tertagih (Rp)
2013	80.000.000	90.056.170	(10.056.170)
2014	87.000.000	89.372.424	(2.372.424)
2015	90.000.000	100.434.000	(10.434.000)
2016	110.000.000	125.277.100	(15.277.100)
2017	123.000.000	117.385.218	5.614.782

Sumber: RAT KP-RI Jaya Dinas P dan K (2019)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa piutang tak tertagih dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 tidak terdapat. Namun berdasarkan hasil wawancara masih didapati piutang tak tertagih, sementara yang menyebabkan realisasi lebih tinggi dari pada piutang yang harus ditagih adalah banyaknya pinjaman anggota yang dibayar lunas dari pada yang tidak tertagih. Demikian juga ditahun 2017 masih ada pembayaran lunas tetapi masih lebih besar piutang tak tertagih.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengendalian internal piutang dan internal piutang tak tertagih pada KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun dan faktor apa yang menyebabkan piutang tak tertagih meningkat pada KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengendalian internal piutang dan internal piutang tak tertagih pada KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun dan untuk mengetahui factor-faktor penyebab piutang tak tertagih meningkat pada KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun

LANDASAN TEORI

Menurut Yadiati dan Ilham (2006:1), “akuntansi adalah suatu ilmu yang di dalamnya berisi tentang bagaimana proses pemikiran sehingga dihasilkan suatu kerangka konseptual yang berisi tentang prinsip, standar, metode dan teknik serta prosedur yang akan dijadikan landasan dalam pelaporan keuangan”. Sedangkan menurut Mulyadi dalam Esteria, Harijanto dan Linda (2016:1089), “sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan”.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Sistem Akuntansi menurut Widjajanto (2001:4), adalah;

1. Serangkaian formulir yang tercetak, seperti faktur, nota, cek yang dipergunakan untuk membangun sistem akuntansi dan administrasi perkantoran, termasuk berbagai prosedur yang merupakan dasar pembuatan ayat-ayat akuntansi.
2. Serangkaian buku bank dalam bentuk fisik berupa kartu-kartu dan buku-buku dalam pengertian harfiah, maupun dalam bentuk format yang hanya dibaca oleh mesin.
3. Serangkaian laporan atau persyaratan, seperti saldo, abstraksi buku, neraca dan perhitungan laba rugi.
4. Serangkaian kegiatan klerikal, khususnya komputer, mesin ketik, sarana komunikasi untuk transfer data, yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sistem.

Menurut Widiasmara (2014), “piutang usaha (*account receivable*) merupakan jumlah yang terutang oleh pembeli yang timbul karena penjualan

kepadanya barang dagangan atau jasa atau aktiva lainnya yang dilakukan secara kredit”. Menurut Siswanto dan Miftahurrohman (2017), “Pengendalian intern atau control intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan system yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu”.

Menurut Hery dalam Sigar, Dolina dan Lucky (2018), “Prinsip-prinsip pengendalian intern yang efektif antara lain adalah sebagai berikut: 1) Penetapan tanggung jawab; 2) Pemisahan tugas; 3) Dokumentasi; 4) Pengendalian fisik mekanik dan elektronik; 5) Pengecekan independen atau verifikasi internal. Sedangkan beberapa aspek dari pengendalian intern piutang yang baik menurut Firdaus (2013:134), adalah sebagai berikut :

1. Memisahkan fungsi pegawai atau bagian yang menangani transaksi penjualan (operasi) dan fungsi “fungsi akuntansi untuk piutang”. Dengan demikian pegawai yang menangani akuntansi untuk piutang dagang dan wesel tagih tidak boleh dilibatkan dengan aspek operasi seperti menyetujui kredit.
2. Pegawai yang menangani akuntansi piutang harus dipisahkan dari fungsi penerimaan hasil tagihan piutang
3. Semua transaksi pemberian kredit, pemberian potongan, dan penghapusan piutang harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang
4. Piutang harus dicatat dalam buku-buku tambahan piutang (*Account Receivable Subsidiaty Ledge*). Total dari saldo-saldo buku tambahan ini harus dicocokkan dengan buku besar

yang bersangkutan paling tidak sebulan sekali. Di samping itu, pada akhir bulan para debitur harus dikirimkan surat pernyataan piutang.

5. Perusahaan harus membuat daftar piutang berdasarkan umurnya.

Selain itu, menurut Hery dalam Audia (2018), menyatakan bahwa: “Piutang tak tertagih timbul adanya pelanggan yang tidak bisa membayar karena menurunnya omset penjualan sebagai akibat dari lesunya perekonomian dan kebangkrutan dialami debitur”.

Hubungan Pengendalian Intern dalam Meminimalkan Piutang Tak Tertagih, adalah menurut Audia (2018), yaitu “Pengendalian atas piutang yang tepat memegang peranan penting pada perusahaan terutama pengendali yang berkaitan dengan kebijakan pemberian kredit. Pengendalian tersebut menekankan pada proses penyelidikan atas kredibilitas debitur, hanya debitur yang memiliki kredibilitas baik yang layak untuk mendapatkan kredit sehingga diharapkan piutang dapat tertagih atau jumlah tak tertagih dapat diminimalkan”. Pendapat di atas dapat diartikan bahwa analisis kredit merupakan pengendalian intern yang dilakukan untuk meminimalisir piutang tak tertagih.

METODE

Penelitian ini menggunakan data primer dengan cara melakukan wawancara langsung ke KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun periode 2013-2017. Desain penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Unsur-unsur Pengendalian Intern

Untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai, maka diperlukan unsur-unsur pengendalian intern yang mampu memenuhi proses pencapaian tujuan tersebut beberapa unsur pengendalian diantaranya adalah:

1. Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggung Jawab Secara Tegas

Untuk struktur organisasi koperasi terdapat rangka pembagian tugas dan tanggung jawab yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada seperti pemisahan fungsi-fungsi yang terkait, diantaranya:

- 1) Fungsi Persetujuan Kredit

Tanggung jawab dari aktifitas persetujuan kredit sudah dilakukan oleh KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun sudah dipisahkan dengan jelas. Aktivitas pengendaliannya adalah memeriksa apakah saldo nasabah yang tertera di buku tabungan atau bukti rekening koran masih cukup atau tidak untuk dilakukannya pemotongan. Hal ini bertujuan agar nantinya tidak terjadi kredit bermasalah.

- 2) Fungsi Akuntansi

Aktifitas fungsi akuntansi yang ada pada KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun telah berjalan dengan baik, dimana fungsi akuntansi memiliki tanggung jawab terpisah dari fungsi lainnya. Hal ini terlihat dari lengkapnya data penerimaan dan pengeluaran kas, daftar nasabah yang melakukan peminjaman setiap bulannya.

- 3) Fungsi Penagihan Piutang

Fungsi penagihan piutang dilakukan oleh pemegang buku piutang dan yang

mengirim daftar tagihan piutang bulanan adalah bagian fungsi penagihan piutang.

2. Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan

Sistem wewenang yang terdapat pada KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun sudah cukup baik. Dapat dilihat dari prosedur pencatatan yang terdapat pada koperasi sudah melalui prosedur yang layak. Saat terjadi transaksi pengeluaran maka bagian kasir, bendahara dan ketua harus mengetahui pengeluaran tersebut dan menandatangani kwitansi pengeluaran.

Untuk pencatatan transaksi pinjaman telah diatur dan didukung oleh dokumen-dokumen seperti formulir permohonan pinjaman, kwitansi pengeluaran kas, kuitansi penerimaan kas dan surat kuasa. Dokumen-dokumen tersebut telah diotorisasi oleh ketua koperasi, berikut dokumen yang digunakan dalam proses pemberian pinjaman kepada anggota ataupun proses penagihan piutang kepada anggota.

3. Praktik yang Sehat

Praktik yang sehat sudah dijalankan oleh koperasi walaupun belum optimal seperti.

1) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak

Formulir yang digunakan oleh KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun belum menggunakan nomor tercetak. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi nasabah untuk melakukan verifikasi atas pembayaran angsuran yang telah dilakukan, karena dalam formulir yang tertera hanya tanda tangan kasir, bendahara, ketua serta stempel koperasi.

2) Pemeriksaan mendadak

Pemeriksaan dilakukan hanya saat anggota meminta seluruh bukti-bukti pembayaran piutang ataupun rincian pembayaran piutang. Biasanya rincian hanya akan diberikan untuk 2 tahun terakhir.

3) Pencatatan transaksi tidak boleh dilakukan oleh satu orang dari awal hingga akhir

Pencatatan transaksi pada KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun dilakukan oleh beberapa orang. Transaksi pinjaman, penerimaan atau pengeluaran kas dilakukan oleh bagian kasir dan bagian pembukuan dengan tujuan agar proses transaksi lebih cepat.

4) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak

Pengambilan cuti tidak pernah dilakukan oleh karyawan hal itu terjadi karena jam kerja KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun hanya sampai pukul 13.00 wib yang berbeda dengan kantor koperasi lainnya.

5) Pencocokan buku kas bendahara dengan buku kas yang dimiliki kasir dilakukan setiap bulannya. Pencocokan dilakukan dengan tujuan agar bendahara mengetahui ada tidaknya perbedaan transaksi yang dicatat..

6) Perputaran jabatan

Perputaran jabatan di KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun tidak pernah dilakukan. Perputaran jabatan akan dilakukan saat jabatan berakhir sesuai dengan SK pengangkatan pengurus.

7) Persyaratan pemberian pinjaman

1) Calon peminjam sudah masuk menjadi anggota KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun ± 6 bulan, juga bekerja sebagai pegawai negeri atau pensiunan pegawai.

Namun pada praktiknya pihak koperasi telah memberikan pinjaman kepada anggota yang masih baru masuk menjadi anggota. Hal inilah yang menyebabkan adanya piutang tak tertagih.

- 2) Aturan pinjaman pertama yang dapat diterima oleh anggota ± 10 juta juga SK terbaru harus dilampirkan beserta diketahui oleh kepala sekolah dan suami/isteri dari anggota. Tetapi di koperasi pinjaman yang diberikan kepada calon peminjam baru lebih dari 10 juta.
- 3) Pinjaman di atas 10 juta harus diketahui oleh ketua koperasi.
- 4) Nasabah yang akan melakukan peminjaman harus memberi kabar paling lama 3 hari sebelum pinjaman diajukan.
- 5) Saat pencairan pinjaman, anggota harus membayar biaya administrasi sebesar 2%, dana resiko 2% dan simpanan wajib usaha 1%. Nilai tersebut diambil dari berapa pinjaman bersih yang diterima oleh anggota. Untuk simpanan wajib usaha akan masuk kedalam saham anggota sendiri.

Analisis Kebijakan Penagihan Piutang

Kebijakan penagihan yang dilakukan oleh pihak KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun hanya menggunakan 2 kebijakan, diantaranya.:

1. Melalui telepon
Penagihan melalui telepon sering digunakan oleh pihak koperasi, hal ini dilakukan untuk menyakan kapan tagihan akan dibayar dan jangka waktu yang diberikan oleh pihak koperasi paling lama tanggal 15 setiap bulannya.
2. Kunjungan personal

Kunjungan personal dilakukan jika pihak koperasi telah membuat perjanjian dengan nasabah untuk datang langsung menjemput tagihan yang telah jatuh tempo. Biasanya kebijakan ini lebih ampuh dibandingkan dengan melalui telepon.

Analisis Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih adalah resiko yang terdapat pada setiap lembaga keuangan. Namun resiko tersebut berasal dari berbagai faktor. Faktor yang menyebabkan piutang tak tertagih pada KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun tidak hanya berasal dari dalam koperasi ada juga dari luar koperasi. Berikut ini besar jumlah tunggakan KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun tahun 2013-2017.

Tabel 5.1 Data Piutang Tak Tertagih KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun Tahun 2013 s/d 2017

Tahun	Piutang Yang Harus Ditagih	Realisasi	Piutang Tak Tertagih	%
2013	80.000.000	90.056.170	(10.056.170)	1,13
2014	87.000.000	89.372.424	(2.372.424)	1,03
2015	90.000.000	100.434.000	(10.434.000)	1,12
2016	110.000.000	125.277.100	(15.277.100)	1,14
2017	123.000.000	117.385.218	5.614.782	0,95

Sumber: KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa piutang tak tertagih dari tahun 2013 sampai 2016 tidak terlihat, namun piutang tertunggak tetap ada. Untuk tahun 2017 piutang tertunggak meningkat dengan persentase 0.95%. dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan ketua koperasi, piutang tertunggak meningkat disebabkan kesengajaan anggota tidak membayar angsuran terutama dibulan februari dan maret.

Faktor lain yang menyebabkan piutang tak tertagih adalah sebagai berikut:

1. Faktor Intern

KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun harus membekali seluruh karyawan dalam melakukan proses analisis pemberian kredit maupun penagihan kredit dengan tujuan agar tidak ada masalah yang menyebabkan piutang tak tertagih.

1) Analisis yang dilakukan oleh pengurus koperasi kurang tepat

Analisis yang digunakan untuk mengetahui karakteristik calon peminjam di KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun masih belum sempurna dimana koperasi hanya menggunakan beberapa analisis.

2) Adanya kolusi

Calon peminjam mengandalkan salah satu pengurus. Proses peminjaman yang dilakukan oleh anggota merupakan tindakan kolusi yang dijalankan oleh pengurus koperasi. Dalam hal ini prosedur pemberian pinjaman tidak dilakukan dengan analisis yang layak.

3) Keterbatasan pengetahuan terhadap jenis usaha anggota

KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun tidak melakukan survei ke alamat calon peminjam, sehingga analisis kredit yang dilakukan tidak maksimal. Survei lapangan tidak pernah dijalankan oleh koperasi, karena anggota koperasi yang hanya melakukan pembayaran angsuran melalui penghasilan (gaji) anggota sehingga survei tidak perlu dilakukan.

2. Faktor Ekstern

Selain faktor intern, faktor ekstern juga dapat menyebabkan terjadinya piutang tak tertagih, diantaranya.

1) Adanya unsur kesengajaan dari anggota yang meminjam atau memiliki karakter buruk yang tidak mau membayar kewajibannya kepada KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun.

2) Anggota yang melakukan peminjaman tidak mempergunakan dengan baik dengan kata lain, anggota melakukan peminjaman tetapi tidak dilakukan sesuai dengan tujuannya.

3) Pindahnya tempat pemotongan angsuran anggota, yang awalnya di potong melalui kantor pos tetapi pada tahun 2017 pindah ke bank mandiri.

Analisis Pengendalian Intern Piutang untuk Meminimalkan Piutang Tak Tertagih pada KP-RI Jaya Dinas P dan K

Untuk meminimalkan piutang tak tertagih yang ada pada KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun sudah melakukan beberapa langkah walaupun belum maksimal. Berikut langkah-langkah yang telah ditempuh koperasi:

1. Melakukan penjemputan langsung ke alamat sekolah atau rumah. Pengurus koperasi harus datang dengan waktu yang tidak terjadwal agar alibi anggota untuk menghindari pembayaran piutang dapat dihindari.

2. Melakukan negosiasi kepada anggota yang mempunyai piutang tak tertagih lebih dari modal anggota. Apa tindakan yang akan dilakukan agar angsurannya dapat ditagih oleh pihak koperasi. Jika nasabah yang memiliki piutang tak tertagih lebih besar dari modal namun masa kerja nasabah \pm 4 bulan atau sudah dalam masa pensiun, maka pihak koperasi melakukan penyitaan SK pensiun nasabah.

3. Memberhentikan penyaluran pinjaman kepada anggota yang memiliki piutang

di atas 5 juta dan jasa tertunggak lebih dari 3 bulan serta sering mengalami kesulitan pembayaran angsuran pinjaman maupun kewajiban selama 6 bulan.

4. Memperhatikan kembali masa kerja anggota yang mengajukan permohonan pinjaman. Anggota yang sudah memasuki masa pensiun tidak diberikan izin untuk meminjam karena masa kerja yang tidak lama lagi dan jaminan untuk tertagih sangat minim.
5. Melakukan penyitaan terhadap surat berharga nasabah yang memiliki jumlah piutang lebih besar dari jumlah modal anggota.

Evaluasi

Evaluasi Unsur-unsur Pengendalian Intern

Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab secara tegas. Struktur yang terdapat pada KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun serta fungsi yang terkait pada KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun sudah berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing tetapi belum maksimal. Hal ini terlihat dari adanya pemisahan fungsi-fungsi yang terkait dengan pemberian pinjaman. Pemisahan fungsi yang terkait merupakan salah satu cara untuk menghindari adanya kesalahan penghitungan piutang dan penyelewengan dana

Untuk praktik yang dijalankan oleh koperasi sudah cukup baik walaupun masih ada beberapa yang belum optimal, seperti penggunaan formulir belum bernomor urut tercetak, pemeriksaan mendadak tidak pernah dilakukan namun pemeriksaan biasa dilakukan sekali tiga bulan, Persyaratan pemberian pinjaman.

Evaluasi Kebijakan Penagihan Piutang

Kebijakan penagihan piutang yang digunakan oleh KP-RI Jaya Dinas P dan K hanya 2, sedangkan penagihan piutang yang baik harus menggunakan 4 kebijakan penagihan dengan tujuan agar penagihan dapat berjalan dengan baik. penagihan piutang dengan 2 metode menyebabkan pihak koperasi kesulitan dalam mengumpulkan piutang dari nasabah. Kebijakan penagihan melalui surat merupakan hal yang memang wajib dilakukan mengingat banyaknya nasabah yang tidak menjawab panggilan telepon pribadi maupun kantor. Tindakan yuridis perlu dilakukan karena banyaknya jumlah piutang yang tidak tertagih dari nasabah.

Evaluasi Piutang Tak Tertagih

Faktor Intern, salah satu penyebab terjadinya piutang tak tertagih karena kurangnya pengendalian terhadap bagian internal koperasi.

- (1) Analisis piutang tak tertagih yang digunakan oleh pihak koperasi hanya menggunakan beberapa analisis. Padahal analisis harus dijalankan seluruhnya, namun penilaian yang digunakan oleh koperasi tidak menggunakan seluruh analisis. Oleh sebab itu sebaiknya pihak koperasi menjalankan seluruh analisis seperti Karakter (*Character*), Kondisi (*Condition*), *Personality*, *Payment*, *Prospect*, *Profitability*,
- (2) *Monitoring* yang dilakukan hanya beberapa kali dalam satu tahun menyebabkan bagian penagihan dalam melakukan pembukuan.

Faktor Ekstern, faktor ekstern yang muncul akibat kurang baiknya analisis pengendalian intern.

- 1) Anggota yang dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran harus

di analisis dengan baik. Oleh sebab itu sebaiknya pihak koperasi meningkatkan cara analisis pemberian pinjaman seperti, membuat surat perjanjian diawal peminjaman untuk mengambil tindakan apabila suatu saat terjadi penunggakan angsuran.

- 2) Dana yang dipinjam oleh anggota tidak digunakan untuk tujuan yang sebenarnya. Untuk itu sebaiknya pihak koperasi mengetahui tujuan dilakukannya peminjaman.

Evaluasi Pengendalian Intern Piutang untuk Meminimalkan Piutang Tak Tertagih KP-RI Jaya Dinas P dan K

Dari hasil analisis pengendalian intern untuk meminimalkan piutang tak tertagih pada KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun memang belum dijalankan dengan optimal. Untuk itu sebaiknya pihak intern koperasi perlu melakukan langkah-langkah seperti penjadwalan kembali (*rescheduling*), untuk malakukan penjadwalan ulang pihak koperasi memberikan pinjaman tambahan kepada anggota agar bisa dilakukan penjadwalan jangka waktu pinjaman. Diberikannya pinjaman hanya syarat bagi koperasi karena penjadwalan ulang jangka waktu pinjaman tidak dapat dilakukan begitu saja jika tidak ada bukti bahwa anggota kembali melakukan pinjaman.

Persyaratan kembali (*reconditioning*), perubahan syarat pinjaman, misalnya pemotongan tagihan anggota melalui bank namun karna saldo yang tidak mencukupi, maka pihak KP-RI Jaya Dinas P dan K memberlakukan pinjaman antar langsung. Yang dimaksud pinjaman antar langsung, pinjaman yang angsurannya diantar langsung oleh anggota. Dan persyaratan kembali berlaku

bagi anggota yang datang langsung membuat perjanjian dengan pihak koperasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengendalian intern piutang untuk meminimalkan piutang tak tertagih KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun belum berjalan efektif. Dapat dilihat dari unsur pengendalin intern, bagian praktik yang sehat dan syarat pemberian pinjaman yang sudah ditetapkan tetapi belum maksimal.
2. Penagihan piutang yang dilakukan oleh pihak koperasi hanya menggunakan 2 metode yaitu melalui telepon dan kunjungan personal dan kurangnya pengetahuan atau pengalaman bagian penagihan piutang menyebabkan pengumpulan piutang setiap bulannya berkurang.
3. Meningkatnya piutang tak tertagih KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun terjadi karena faktor intern dan ekstern. Faktor intern yaitu adanya kolusi dari pengurus koperasi dan faktor eksternal yaitu adanya unsur kesengajaan dari anggota untuk tidak membayar angsurannya.
4. Pengendalian intern dalam meminimalkan piutang tak tertagih melakukan beberapa langkah, diantaranya penjemputan langsung, melakukan negosiasi, memberhentikan penyaluran pinjaman, memperhatikan masa kerja dan melakukan penyitaan surat berharga.

Saran

1. Sebaiknya praktik yang sehat dan syarat pemberian pinjaman lebih dimaksimalkan.

2. Untuk meningkatkan penagihan piutang tidak tertagih yang ada di koperasi sebaiknya menggunakan kebijakan melalui surat dan tindakan yuridis.
3. Sebaiknya pihak koperasi membuat surat perjanjian diawal peminjaman untuk mengambil tindakan apabila suatu saat terjadi penunggakan angsuran serta sikap kolusi tidak diterapkan di lingkungan koperasi.
4. Sebaiknya KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun mempertimbangkan penjadwalan ulang, persyaratan kembali dan penataan ulang untuk piutang yang cukup lama tidak tertagih.

DAFTAR PUSTAKA

Audia, Yossi (2018). Analisis Sistem Pengendalian Intern Piutang Dalam Meminimalkan Piutang Tak Tertagih Pada Pt. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Belawan. *Skripsi*, dipublikasikan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Esteria, Ni Wayan, Harijanto Subijono & Linda Lambey (2016). Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pngeluaran Kas pada PT. Hasjrat Abadi Manado. *Jurnal Berkala Iliah Efisiensi*, XVI (04), 1087-1097. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/14197/13771>.

Firdaus, A. 2013. Dunia Buku Pengantar Akuntansi. Jakarta :Penebit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sigar, Reginaldo Jeniver Kevin, Dolina L. Tampi dan Lucky F. Tamengkel (2018). Pengendalian Intern Piutang Usaha pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Manado. *Jurnal*

Administrasi dan Bisnis, VII (1), 24-32. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/269377>

Siswanto, Edy, & Miftahurrohman (2017). Sistem Informasi Pengendalian Intern Atas Piutang Untuk Meminimalkan Jumlah Piutang Tak Tertagih Pada Ksu Makmur Mandiri Menggunakan Metode Umur Piutang. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, VIII(2), 45-52. Retrieved from <http://ejurnal.provisi.ac.id/index.php/JTIKP/article/download/161>

Widiasmara, Anny (2014). Analisis Pengendalian Inten Piutang Usaha Untuk Meminimalkan Piutang Tak Tertagih (Bed Debt) pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Cabang Madiun. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*. X (2), 110-117. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/307667654>

Widjajanto, Nugroho. 2001. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta :Erlangga.

Yadiati, Winwin dan Iham Wahyudi. 2006. Pengantar Akuntansi. Jakarta : Penada Media Group

PROFIL SINGKAT

Efriliana Naibaho, Pendidikan terakhir Sarjana Akuntansi dari STIE Sultan Agung dan saat ini bekerja sebagai Pegawai di KP-RI Jaya Dinas P dan K Kabupaten Simalungun. Supitriyani, Lahir 16 Mei 1988, Pendidikan terakhir Pascasarjana Program Studi Akuntansi dari Universitas Sumatera Utara Tahunn 2013 dan sekarang bekerja sebagai Dosen Tetap bidang Akuntansi STIE Sultan Agung. Sepbeariska Manurung, Pematangsiantar, 26 September 1986 Pendidikan terakhir Pascasarjana Program Studi Akuntansi dari

Universitas Sumatera Utara dan sekarang bekerja sebagai Dosen Tetap bidang Akuntansi STIE Sultan Agung. Nelly Ervina, lahir pada tanggal 27 Mei 1989 di Pematangsiantar. Pendidikan terakhir

Pascasarjana Program Studi Akuntansi dari Universitas Sumatera Utara, tahun kelulusan 2016 dan sekarang bekerja sebagai Dosen Tetap bidang Akuntansi STIE Sultan Agung.